



**Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional**

Terakreditasi A

SK-BAN-PT NO: 3095/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2019

**Kebijakan Ekonomi Luar Negeri India yang Proteksionis
di bawah Pemerintahan Perdana Menteri Narendra Modi
Periode 2014-2018.**

Skripsi

Oleh
Natasha Winona
6091801169

**Bandung
2021**



**Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional**

Terakreditasi A

SK-BAN-PT NO: 3095/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2019

**Kebijakan Ekonomi Luar Negeri India yang Proteksionis
di bawah Pemerintahan Perdana Menteri Narendra Modi
Periode 2014-2018.**

Skripsi

Oleh
Natasha Winona
6091801169

Pembimbing
Sylvia Yazid, S.IP., MPPM., Ph.D.

**Bandung
2021**

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan Ilmu Hubungan Internasional
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional



Tanda Pengesahan Skripsi

Nama : Natasha Winona
NPM : 6091801169
Judul : Kebijakan Ekonomi Luar Negeri India yang Proteksionis di bawah Pemerintahan Perdana Menteri Narendra Modi Periode 2014-2018.

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana
Pada Jumat, 14 Januari 2022
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji

Ketua sidang merangkap anggota

Mireille Marcia Karman, S.Sos., M.Litt.

:

Sekretaris

Sylvia Yazid, S.IP., MPPM., Ph.D.

:

Anggota

Elisabeth A. Satya Dewi, S.IP., M.A., Ph.D. :

Mengesahkan
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si.

Pernyataan

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Natasha Winona
NPM : 6091801169
Jurusan / Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional
Judul : Kebijakan Ekonomi Luar Negeri India yang Proteksionis di bawah Pemerintahan Perdana Menteri Narendra Modi Periode 2014-2018.

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidh penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 23 Desember 2021

A yellow rectangular stamp with the text "METERAI TEMPEL" and a serial number "SDA.DK567601895". A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

Natasha Winona

Abstrak

Nama : Natasha Winona
NPM : 6091801169
Judul : Kebijakan Ekonomi Luar Negeri India yang Proteksionis di bawah Pemerintahan Perdana Menteri Narendra Modi Periode 2014-2018.

India telah menganut sistem proteksionisme sejak awal negara tersebut meraih kemerdekaannya dengan memfokuskan ekonomi kepada industri-industri dalam negeri serta mengurangi masuknya produk-produk impor ke dalam pasar domestik. Namun, hal ini berubah ketika pada tahun 1991 India melakukan liberalisasi ekonomi sebagai bentuk timbal balik dari pinjaman yang diajukan pada International Monetary Fund (IMF) karena pada saat itu India terjerat dalam hutang yang besar. Seiring dengan berjalannya liberalisasi yang dinamakan sebagai reformasi 1991, India banyak mengalami peningkatan dalam perekonomian, hal ini ditandai dengan peningkatan GDP per kapita yang tidak pernah India alami sebelumnya. Namun, banyak perubahan terjadi ketika Perdana Menteri Narendra Modi terpilih mewakili partainya, yakni *Bharatiya Janata Party* (BJP) dalam pemilihan umum tahun 2014. Naiknya Modi ke kursi pemerintahan membawa serangkaian kebijakan-kebijakan baru yang justru membawa India untuk kembali masuk ke dalam sistem ekonomi yang proteksionisme. Atas dasar tersebut, penelitian ini mencoba untuk menjawab pertanyaan, “Mengapa India menerapkan kebijakan luar negeri yang proteksionis dalam bidang ekonomi di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Narendra Modi pada tahun 2014 hingga 2018?”.

Penulis menggunakan kerangka pemikiran milik Michael Brecher, yakni *foreign policy analysis theoretical integration* yang menyatakan adanya faktor-faktor dalam lingkup operasional dan psikologis yang memengaruhi seluruh proses perumusan kebijakan. Analisis menghasilkan bahwa dalam lingkup operasional, tindakan proteksionis Modi dipengaruhi oleh adanya kegagalan-kegagalan selama masa reformasi 1991 yang menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat India dan adanya hubungan rivalitas antara India dengan Tiongkok. Dari faktor psikologis terdapat faktor-faktor lain yang melihat bagaimana Modi sebagai individu yang menjunjung nasionalisme dan juga BJP sebagai partai yang menerapkan *integral humanism* yang menentang adanya kapitalisme dan komunisme.

Kata kunci: proteksionisme, India, Narendra Modi, kebijakan luar negeri, kebijakan ekonomi

Abstract

Nama : Natasha Winona

NPM : 6091801169

Judul : India's Protectionist Economic Policy under Prime Minister Narendra Modi in 2014-2018.

India has adhered to a system of protectionism since the beginning of the country's independence by focusing the economy on domestic industries and reducing the entry of imported products into the domestic market. However, this changed when in 1991 India carry out economic liberalization as a form of reciprocity from a loan proposed to the International Monetary Fund (IMF) because at that time India was entangled in huge debt. India's decision to liberalize its economy was later called the 1991 reform. Along with the 1991 reforms, India experienced many improvements in the economy, this was marked by an increase in GDP per capita that India had never experienced before, besides that the name of the country of India was also increasingly recognized in the world international. This is caused by the ease in international trade. However, many changes occurred when Prime Minister Narendra Modi was elected to represent his party, namely the *Bharatiya Janata Party* (BJP) in the 2014 general election. Modi's ascension to the seat of government brought a series of new policies to advance the Indian economy. However, Modi's actions have brought India back into a protectionist economic system. On this basis, this study tries to answer the question, "Why did India implement a protectionist foreign policy in the post-reform economy in 1991 under the leadership of Prime Minister Narendra Modi in 2014 to 2018?".

The author uses Michael Brecher's framework, foreign policy analysis theoretical integration which states that there are factors in the operational and psychological scope that influence the entire policy formulation process. The analysis shows that in the operational sphere, Modi's protectionist actions were influenced by the failures during the 1991 reform period which reduced the welfare of Indian society and the rivalry between India and China. In addition, there are other factors analyzed in the scope of psychological which see how Modi as an individual who upholds nationalism and also the BJP as a party that implements integral humanism that opposes capitalism and communism.

Keywords: protectionism, India, Narendra Modi, foreign policy, economic policy

Kata Pengantar

Puji syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas seizin-Nya lah, penuli dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Kebijakan Ekonomi Luar Negeri India yang Proteksionis di bawah Pemerintahan Perdana Menteri Narendra Modi Periode 2014-2018” dengan baik dan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Adapun penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan Program Sarjana di Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Katolik Parahyangan. Dalam prosesnya, skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya bimbingan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada seluru pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini.

Penulis juga menyadari bahwa penelitian ini jauh dari sempurna, dan untuk itu dengan segala kerendahan hati, penulis memohon maaf atas kekurangan yang ada dalam penulisan skripsi ini. Penulis juga terbuka terhadap segala kritik dan saran yang ditujukan untuk membuat penelitian ini menjadi lebih baik lagi. Terakhir, penulis berharap dengan adanya penelitian ini dapat bermanfaat, terkhususnya bagi penelitian-penelitian terkait kebijakan ekonomi lainnya.

Bandung, 23 Desember 2021

Natasha Winona

Ucapan Terima Kasih

1. Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada kata lain yang dapat penulis sampaikan kecuali terima kasih. *It's not because of who I am but because of who You are.*
2. Terima kasih yang tidak terhitung untuk *my number one support system*, Mama Ninik, untuk segala cemilan hangat yang selalu siap menemani penulis dalam pengerjaan skripsi ini. Untuk doa yang tidak pernah lupa dipanjatkan setiap paginya. *Ma you are truly my prayer warrior and believer in miracles.* Tidak lupa juga untuk satu-satunya *guardian angel* penulis sejak lahir, Reuben Alexandro, terima kasih untuk segala support dan bantunya selama ini, tidak lupa terima kasih untuk setiap candaan yang menghibur penulis.
3. Teruntuk Mba Sylvia Yazid, terima kasih banyak telah menjadi dosen pembimbing terbaik yang tidak pernah penulis bayangkan. Terima kasih atas segala masukan yang menjadikan skripsi ini lebih baik lagi. Berkat ilmu, kritik serta waktu yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu, terima kasih banyak, Mba Syl.
4. Kepada seluruh dosen dan tenaga pengajar Universitas Katholik Parahyangan, berkat ilmu yang diberikan kepada penulis selama masa studi di Gedung 3 terima kasih banyak mas dan mba.
5. Banyak terima kasih juga kepada Elin, terima kasih atas segala bentuk kata-kata penyemangat dan *support* yang diberikan setiap harinya sejak semester 1. Banyak tawa dan tangis yang dilalui bersama selama kuliah, dan terima kasih telah menjadi teman makan sate terbaik. Teruntuk Caroline, terima kasih karena telah menjadi pendengar yang setia serta pemberi masukan nomor 1. Terima kasih Carol untuk semua foto ebec sebagai hiburan penulis ditengah pengerjaan skripsi. Untuk Bellereine, terima kasih karena telah menjadi teman terbaik penulis sejak hari pertama di UNPAR, untuk semua museum yang sudah kita kunjungi, terima kasih. Semoga kita berempap selalu bersama.
6. Teruntuk Tistry (Avila), terima kasih karena sudah sama-sama jatuh ketika bakdes semester 1 sehingga kita bertemu, untuk semua *late night talks*, dukungan yang diberikan, tidak lupa juga terima kasih karena telah mengenalkan penulis pada salah satu *band* terbaik di dunia. Juga untuk salah satu teman

terbaik penulis, Michael Aji, terima kasih untuk segala candaan nya di *twitter*, untuk seluruh bantuannya sejak GINTRE, terima kasih.

7. Teman-teman Middle Youth, khususnya AOG 45 GMS Bandung atas doa-doa terbaik yang selalu diberikan kepada penulis. Penulis ucapkan banyak terima kasih.
8. Ciwiks, Magda, Paopao, Vivi, Jenjen, Tricia, Nasya, Glenda, Jamie yang telah menjadi penyemangat penulis selama masa kuliah. Terima kasih telah menjadi teman baik penulis selama di Bandung.
9. Teman-teman bimbingan penulis, Rizky, Sarah, Claus, dan Dinar, terima kasih atas semua bantuan selama proses bimbingan penulis. *We did it guys!*
10. Tidak lupa dengan lagu-lagu yang selalu ada buat penulis selama proses pengerjaan skripsi ini, terima kasih kepada DAY6, One Direction, Joji dan Keshi.

Daftar Isi

Abstrak	i
<i>Abstract</i>	ii
Kata Pengantar	iii
Ucapan Terima Kasih	iv
Daftar Isi	vi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	6
1.2.1 Pembatasan Masalah.....	9
1.2.2 Perumusan Masalah	10
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
1.3.1 Tujuan Penelitian	10
1.3.2 Kegunaan Penelitian	11
1.4 Kajian Literatur	11
1.5 Kerangka Pemikiran	14
1.6 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data.....	17
1.6.1 Metode Penelitian	17
1.6.2 Teknik Pengumpulan Data.....	18
1.7 Sistematika Pembahasan	18
BAB 2 KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDIA YANG PROTEKSIONIS DALAM BIDANG EKONOMI	20
2.1 Karakteristik Tindakan Proteksionisme	21
2.2 Langkah-Langkah Proteksionis India dalam Bidang Ekonomi di bawah Pemerintahan Narendra Modi.....	25
2.2.1 Inisiatif <i>Make in India</i>	27
2.2.2 Pemberian Bantuan Subsidi dan Pinjaman Demi Memfasilitasi Industri Kecil Dalam Negeri	31
2.2.3 Pemberlakuan Pembatasan Terhadap Produk Impor	35
2.3 Implikasi Serta Tantangan atas Tindakan Proteksionisme India	38

BAB 3 PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN KEBIJAKAN LUAR NEGERI DI INDIA.....	43
3.1 Aktor-Aktor Penting dalam Pengambilan Keputusan Kebijakan Luar Negeri di India	44
3.2 Kontestasi Politik Partai Domestik yang Mendominasi Pemerintahan India	49
3.2.1 Bharatiya Janata Party (BJP)	50
3.2.2 Indian National Congress (INC)	53
3.2.3 Communist Party of India (CPI).....	54
3.3 Perdana Menteri Narendra Modi sebagai Aktor Penting dalam Proses Pengambilan Keputusan Kebijakan Luar Negeri India.....	56
3.3.1 Latar Belakang dan Karir Politik Narendra Modi	57
3.3.2 Gaya Diplomatik Pemerintahan Narendra Modi	60
BAB 4 FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDIA YANG PROTEKSIONIS DALAM BIDANG EKONOMI	63
4.1 Faktor-Faktor Dalam Lingkup Operasional yang Memengaruhi Pengambilan Keputusan Kebijakan Ekonomi Luar Negeri India yang Proteksionisme.....	64
4.1.1 Lingkup Operasional Internal Politik dan Ekonomi India Pasca Reformasi 1991	64
4.1.2 Lingkup Operasional Eksternal Persaingan Kekuatan Ekonomi dengan Tiongkok	72
4.2 Faktor-Faktor Dalam Lingkup Psikologis yang Memengaruhi Pengambilan Keputusan Kebijakan Ekonomi Luar Negeri India yang Proteksionisme.....	76
4.2.1 Idiosinkratik Perdana Menteri Narendra Modi dan BJP dalam Pemerintahan	77
4.2.2 Fokus Pemerintah dan Pandangan Masyarakat India Untuk Membangun Dominasi India dalam Perekonomian.....	80
4.3 Tindakan Proteksionis sebagai Bentuk Nasionalisme Modi kepada India	84
BAB 5 KESIMPULAN	89
Daftar Pustaka.....	94

Daftar Grafik

Grafik 4.1 Pengalokasian Dana Pemerintah India Terhadap Sektor Informal.....	67
Grafik 4.2 Persentase Tingkat Pengangguran di India.....	71
Grafik 4.3 Perbandingan <i>Gross Domestic Product</i> (GDP) India dan Tiongkok 1991-2014.....	73
Grafik 4.4 Perbandingan Jumlah Impor dan Ekspor India terhadap Tiongkok	75

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

India meraih kemerdekaannya setelah dijajah oleh bangsa Inggris selama kurang lebih 100 tahun. Pada tahun 1947, India mendapatkan kemerdekaannya dan dipimpin oleh partai kongres yang memanfaatkan keuntungannya sebagai ujung tombak perjuangan kemerdekaan dengan memerintah selama lebih dari empat dekade.¹ Partai tersebut pada saat itu merupakan partai sosialis yang mencari ekonomi mandiri dan berkecukupan dengan memanfaatkan arus globalisasi, dengan tujuan agar kontrol tertinggi dalam ekonomi tetap dipegang oleh negara². Selama gerakan kemerdekaan, partai sosialis ini berkampanye menyuarakan agar orang-orang India hanya membeli barang-barang yang diproduksi dalam negeri dan membakar barang-barang impor buatan Inggris.

Sejak memperoleh kemerdekaannya negara India sudah menerapkan kebijakan-kebijakan proteksionisme dalam aktivitas perekonomian negara yang tentunya membawa pengaruh signifikan terhadap perdagangan internasionalnya. Pimpinan partai di India saat itu hendak mewujudkan adanya kemandirian ekonomi dengan tujuan untuk menopang politik kemerdekaan³. Namun, pada pertengahan

¹“Independence Day,” The Editors of Encyclopedia Britannica, *Britannica*, <https://www.britannica.com/topic/Independence-Day-Indian-holiday>. (diakses pada 5 April 2021).

² Swaminathan S Anklesaria Aiyar, “India’s New Protectionism Threatens Gains from Economic Reform,” 2018, No. 851

³ Ibid.

tahun 1991, nilai tukar mata uang India, *rupee* mengalami penyesuaian yang sangat parah ditandai dengan penurunan yang tajam. Kebijakan ekonomi yang proteksionis ini membuat India menetapkan tarif impor yang terbilang tinggi dibandingkan dengan negara-negara lainnya, serta persyaratan perizinan industri yang dibuat kompleks dan perekonomian yang terpusat.

Pada awal tahun 1980-an defisit perdagangan India masih tergolong rendah yaitu sebesar 1,5% dari total Produk Domestik Bruto (PDB), akan tetapi hal tersebut tidak bertahan lama karena pada pertengahan tahun 1980-an, defisit perdagangan India semakin meningkat. Padahal pada masa itu, perekonomian India semakin liberal atau terbuka. Hal ini dapat dilihat dengan berbagai persyaratan Impor yang diperlonggar atau dipermudah.⁴ Peningkatan defisit perdagangan ini mengakibatkan nilai impor yang terus meningkat dengan cepat. Banyaknya impor minyak bumi India pun meningkat lebih dari 40% dikarenakan adanya produksi minyak dalam negeri yang lambat, tetapi dengan konsumsi masyarakat yang tetap kuat⁵.

Terdapat dua faktor eksternal yang turut berkontribusi secara signifikan terhadap angka defisit perdagangan India, pertama datang dari berbagai isu-isu atau peristiwa yang terjadi di Timur Tengah. Sebagai kawasan penghasil minyak dunia terbanyak, peristiwa yang terjadi di Timur Tengah pada tahun 1991 tentu berimplikasi pada kenaikan harga minyak dunia. Kedua, berkurangnya aktivitas pasar India. Krisis yang terjadi Timur Tengah juga berdampak bagi Uni Soviet

⁴Valerie Cerra & Sweta Chaman Saxena, "What Caused the 1991 Currency Crisis in India," *IMF Working Paper*, 3-4.

⁵ Ibid.

yang pada saat itu merupakan salah satu mitra dagang terbesar India. Ditambah dengan tingkat pertumbuhan dunia yang juga ikut mengalami penurunan dari 4,5% pada tahun 1988 menjadi 2,25% pada tahun 1991 memengaruhi negara Amerika Serikat yang pada masa itu merupakan satu-satunya negara tujuan ekspor terbesar India.⁶

Di samping adanya faktor-faktor eksternal di atas, beberapa faktor internal juga turut memengaruhi terjadinya krisis di India pada tahun 1991.⁷ Faktor internal ini meliputi adanya faktor politik dalam negeri, di mana setelah pemilihan umum yang buruk pada tahun 1989, partai yang berkuasa sebelumnya menolak mentah-mentah pembentukan pemerintahan koalisi. Partai ini diketuai oleh Rajiv Gandhi sebagai mantan perdana menteri India yang baru saja menghabiskan masa jabatannya. Sedangkan, partai terbesar lainnya, yaitu Janata Dal membentuk pemerintahan koalisi yang dipimpin oleh V.P. Singh. Namun, ternyata dengan adanya koalisi ini memperburuk keadaan dalam negeri India, banyak perselisihan terjadi khususnya dalam perbedaan agama ditengah masyarakat yang memancing terjadinya kerusuhan besar di India. Akibatnya, pada Desember 1990, pemerintahan Singh dijatuhkan dan lebih lanjut, akibat dari adanya kehancuran politik ini, para investor luar negeri menjadi ragu untuk menaruh investasinya di India.

Rangkaian kejadian di atas menyebabkan krisis ekonomi di India tidak dapat dihindari. Saat itu nilai mata uang India menurun secara drastis sehingga India pun akhirnya dibantu oleh International Monetary Fund (IMF), yakni sebuah badan

⁶ Ibid.

⁷ Ibid.

yang berfokus untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja setiap negara sehingga semua negara bisa mendapatkan keuntungan dari kemakmuran bersama⁸. IMF memberikan pinjaman dana kepada India untuk mencegah kegagalan pembayaran hutang, karena pada saat itu hutang luar negeri India terancam tidak dapat dipenuhi.⁹ Hal inilah yang kemudian menjadi titik balik India. India kemudian mulai mereformasi kebijakan-kebijakannya terutama kebijakan ekonominya dengan membuka pintu perdagangannya lebih luas.

Reformasi yang terjadi pada tahun 1991 ini bukanlah yang pertama kali bagi India, setelah beberapa percobaan reformasi di tahun 1966 dan 1985 yang tidak membuahkan hasil apapun. Kemudian, reformasi 1991 ini diinisiasikan berdasarkan pada *the 1991 Union Budget* yang menyatakan pentingnya mereformasi kebijakan perdagangan sebagai bagian dari keseluruhan program reformasi.¹⁰ Reformasi ini pun dibentuk dengan tujuan untuk membentuk perekonomian India lebih berorientasi pada peran pasar dan jasa, dan dengan memperluas peran dari para investor asing baik publik maupun swasta. Perubahan ini dilakukan juga sebagai salah satu pemenuhan syarat yang diberikan oleh IMF kepada pemerintah India untuk mendapatkan bantuan pinjaman sebesar 500 miliar *US Dollar*.¹¹

⁸“International Monetary Fund,” *IMF*, [https://www.imf.org/en/About#:~:text=The%20International%20Monetary%20Fund%20\(IMF,red%20uce%20poverty%20around%20the%20world](https://www.imf.org/en/About#:~:text=The%20International%20Monetary%20Fund%20(IMF,red%20uce%20poverty%20around%20the%20world). (diakses pada 5 April 2021).

⁹ Remya Nair, “The Making of Budget 1991,” *livemint*, 9 Februari 2016, <https://www.livemint.com/Home-Page/AhZbrw8aLWlbE558h9ofxL/The-making-of-Budget-1991.html>. (diakses pada 6 April 2021).

¹⁰Harsha Vardhana Singh, “Trade Policy Reform in India Since 1991,” *Brookings India Working Paper 02*, March 2017, 9, https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2017/03/workingpaper_reformshvs_march2017.pdf, (diakses pada 6 April 2021).

¹¹Ahmad et al., “India’s Growth Story,” *Policy Research working paper*, 2018, no. WPS 8599, Washington, D.C.: World Bank Group,

Salah satu hal yang berubah secara signifikan adalah sektor perdagangan internasional. Liberalisasi atau reformasi ekonomi berarti terbukanya pintu perdagangan internasional selebar-lebarnya, dan hal ini merupakan sesuatu yang dapat dikatakan baru bagi India. Sebelumnya, kebijakan perdagangan difokuskan pada langkah-langkah perbatasan, seperti tarif, kuota, perizinan impor serta larangan impor. Beberapa kebijakan di dalam pembatasan ini dianggap berdampak terhadap kondisi perdagangan, seperti subsidi dan persyaratan-persyaratan dalam negeri. Liberalisasi ekonomi ini telah didukung oleh masyarakat India demi pertumbuhan ekonomi yang tinggi yang dicatat oleh negara tersebut pada 1990-an hingga 2000-an.¹² Perubahan-perubahan spesifik terjadi dalam liberalisasi ekonomi, antara lain pengurangan tarif impor, deregulasi pasar, pengurangan pajak, serta masuknya investasi asing dalam jumlah yang besar.

Reformasi ekonomi ini memiliki dampak positif maupun negatif terhadap perekonomian India. Peningkatan GDP per kapita India yang semula berada di angka 1,25 persen melonjak berkali-kali lipat menjadi 7,5 persen setelah reformasi, terlebih lagi dalam bidang jasa di mana kebijakan pemerintah lebih dipermudah menimbulkan pertumbuhan yang secara signifikan terjadi dalam bidang komunikasi, pengurusan aset, asuransi, dan juga teknologi informasi.¹³ Adanya keterbukaan dalam bidang ekonomi ini memberikan manfaat yang begitu besar terhadap pembangunan ekonomi India, hal ini berbanding terbalik dengan kondisi India sebelumnya di mana dengan sistem proteksionisnya justru membuat India

<http://documents.worldbank.org/curated/en/941201538406933607/Indias-Growth-Story>. (diakses pada 5 April 2021).

¹² Ibid.

¹³ Ibid., Ahmad

harus menahan diri dalam keterpurukan dalam ekonominya. Perubahan sistem ekonomi ini juga membawa India diakui dan dikenal dalam pasar global. Kemajuan dalam bidang teknologi dan informasi turut membantu India untuk berani menggerakkan roda investasinya.

Memasuki tahun 2008, perekonomian India mulai mengalami stagnasi akibat adanya resesi global, sehingga pada tahun 2014 seiring dengan naiknya Perdana Menteri Narendra Modi ke dalam pemerintahan dengan membawa kebijakan-kebijakan ekonomi baru yang secara tidak langsung membawa India kembali ke dalam kebijakan ekonomi yang proteksionis seperti sebelum reformasi. Sehingga naiknya Perdana Menteri Modi sekaligus menjadi titik balik dari kebijakan perekonomian di India, di mana Modi mulai melakukan tindakan proteksionis dalam aktivitas perekonomian India.

1.2 Identifikasi Masalah

Selama kurang lebih seperempat abad, India telah membuat langkah yang mengesankan melalui reformasi ekonominya, diiringi dengan meningkatnya tingkat pertumbuhan PDB India serta semakin dikenalnya India di dalam pasar global. Hasil reformasi mencapai puncaknya pada tahun 2006 ketika India saat itu tercatat memiliki nilai tingkat pertumbuhan PDB tertinggi sebesar 9,6 persen.¹⁴ Namun, memasuki tahun 2008 kemudian perekonomian India mengalami stagnasi serta kemunduran oleh karena adanya *great recession* yang terjadi secara global. Keberhasilan yang dicapai oleh India dalam bidang ekonomi belum diimbangi

¹⁴ Ibid., Ahmad

dengan adanya kesuksesan sosial. Indikator kesejahteraan sosial, seperti pendidikan dan kesehatan di India meningkat sangat lambat, terlebih dengan kualitas layanan pemerintah yang buruk.

Dalam sektor kesehatan, sebagai akibat dari resesi global serta reformasi India dapat dikatakan berada pada posisi rendah dalam pengeluaran PDB untuk bidang kesehatan. Indikator kesehatan India berada di bawah standar, di mana sebesar 80% masyarakatnya menderita anemia, serta tingkat kekurangan gizi anak tertinggi di dunia.¹⁵ Layanan utama India, seperti kepolisian, hukum, infrastruktur jalanan, dan sanitasi juga mengalami kemunduran. Banyaknya kriminalitas termasuk tingkat korupsi dan kurangnya tenaga penegak keadilan menjadi salah satu faktor tidak tercapainya kesejahteraan sosial di India. Terlebih lagi, meskipun tingkat tenaga kerja di India pada saat reformasi meningkat, akan tetapi angka pengangguran turut meningkat pula. Rasio populasi pekerja telah menurun pasca reformasi, khususnya selama tahun-tahun terakhir reformasi, yaitu 1999-2000.¹⁶

Ketimpangan serta kemiskinan di India memiliki dimensi spasial yang berbeda, terdapat indikasi bahwa reformasi ekonomi telah secara signifikan mempolarisasi disparitas regional atau kawasan. Terutama di daerah-daerah pinggiran yang tertinggal, di mana angka kemiskinan masih sangat tinggi, dan dari beberapa daerah terpencil bahkan banyak kelaparan, malnutrisi, dan bahkan aksi

¹⁵SA Aiyar, "25 years on, the good, bad and ugly reforms," *Times of India*, 2016, <https://timesofindia.indiatimes.com/blogs/Swaminomics/25-years-on-the-good-bad-and-ugly-of-reforms/> (diakses pada 6 April 2021).

¹⁶Eberhard Weber, "Economic reform, social development and conflict in India," 2012, doi:10.1111/j.1757-7802.2012.01069.x

bunuh diri yang dilakukan oleh para petani di India.¹⁷ Terhitung sekitar 200.000 petani bunuh diri di rentang tahun 1995 hingga 2006.¹⁸ Sehingga keadaan ini menunjukkan efek negatif yang ditimbulkan akibat adanya reformasi ekonomi. Kemerosotan ekonomi ini berkaitan erat dengan pengabaian sektor pertanian yang merupakan sektor terbesar di India. Hutang yang disebabkan oleh komersialisasi pertanian, menurunnya dukungan pemerintah dalam sektor pertanian serta adanya privatisasi kredit mikro bagi para petani merupakan faktor utama peningkatan kemiskinan dalam negeri.¹⁹

Setelah beberapa tahun menerapkan liberalisasi ekonomi, pada tahun 2014, ketika Narendra Modi resmi diangkat menjadi Perdana Menteri India, ia membentuk kampanye '*Make in India*' yang dibentuk untuk memfasilitasi investasi, demi terciptanya kembali pengembangan inovasi, meningkatkan keterampilan masyarakat India, melindungi properti serta membangun infrastruktur manufaktur²⁰. Pada masa kampanyenya, Modi menjanjikan lapangan pekerjaan yang baik bagi semua masyarakatnya dengan penekanan khusus pada pekerjaan-pekerjaan di bidang manufaktur. Ia menekankan pada pentingnya negara untuk membina pemilik-pemilik usaha kecil yang juga merupakan dukungan inti dari partainya, BJP. Ia juga kemudian menciptakan lembaga pemerintah baru yang disebut Bank Mudra untuk membiayai kembali pinjaman kepada usaha mikro,

¹⁷AK Mehta, Shah A, "Chronic Poverty in India: Incidence, cause, and policies," *World Development*, 31, 491-511

¹⁸Nagraj K, "Farmers' Suicides in India: Magnitudes, trends and spatial patterns," *Madras Institute of Development Studies*, Chennai

¹⁹T. Nair, "Microfinance: Lessons from a crisis," *Economic and Political Weekly*, 5, p. 23-26

²⁰"PMINDIA," *Prime Minister of India Make In India Comments*, https://www.pmindia.gov.in/en/major_initiatives/make-in-india/. (diakses pada 6 April 2021).

kecil, dan menengah (UMKM), dan juga membentuk Kementerian UMKM baru untuk mengadvokasi tujuan mereka lebih kuat daripada Kementerian Perindustrian, yang cenderung fokus pada bisnis besar.²¹

Pada awal masa jabatannya, Perdana Menteri Modi mengangkat slogan, “*Minimum government, maximum governance.*” Bahkan, lebih lanjut dia memperluas peran pemerintahan dalam kesejahteraan masyarakatnya. Tekanan dari luar, seperti ancaman dari Tiongkok turut mendorong India masuk ke dalam sistem proteksionisme kembali seperti sebelum reformasi.²² Tak hanya itu, Perdana Menteri Modi juga mengusungkan kebijakan yang mendorong masyarakat untuk membeli produk lokal serta kembali mempersulit masuknya barang-barang atau produk impor ke dalam India. Meskipun tidak secara langsung mengatakan bahwa India kembali menjadi negara proteksionis, tetapi melihat pada tindakan-tindakan yang diambil oleh Modi dalam perekonomian dapat dikatakan bahwa Modi kembali membawa praktik proteksionisme bagi India.

1.2.1 Pembatasan Masalah

Dari beberapa masalah yang telah disebutkan di atas, maka topik penelitian ini dikerucutkan ke dalam satu permasalahan, yaitu alasan di balik Perdana Menteri Narendra Modi mengambil tindakan-tindakan proteksionis dalam aktivitas

²¹Banikinkar Pattanayak, “Policy reversal? Import tariffs up 4 pps since 2014, seem rising further,” *Financial Express*, July 2020, <https://www.financialexpress.com/economy/policy-reversal-import-tariffs-up-4-pps-since-2014-seem-rising-further/2021775/> (diakses pada 6 April 2021).

²²Swaminathan S Anklesaria Aiyar, “India’s New Protectionism Threatens Gains from Economic Reform,” *CATO Institute*, 2018, Policy Analysis, No. 851, <https://www.cato.org/policy-analysis/indias-new-protectionism-threatens-gains-economic-reform>. (diakses pada 6 April 2021).

perekonomian India setelah melalui liberalisasi dalam reformasi pada tahun 2014 hingga 2018. Adapun masa pemerintahan Pemerintah Modi yang dibahas disini adalah pada putaran pertama, dengan batasan waktu dimulai pada saat Perdana Menteri Modi memimpin, yakni 2014 hingga pada tahun 2018.

1.2.2 Perumusan Masalah

Pengambilan keputusan kebijakan India untuk kembali melaksanakan tindakan-tindakan proteksionis setelah merasakan reformasi ekonomi dalam bentuk liberalisasi serta keterbukaan terhadap pasar global yang kemudian menarik untuk diteliti. Sehingga penelitian ini menganalisis faktor-faktor yang menjadi alasan di balik tindakan proteksionis di India pasca reformasi dengan pertanyaan penelitian, **Mengapa India menerapkan kebijakan luar negeri yang proteksionis dalam bidang ekonomi di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Narendra Modi pada tahun 2014 hingga 2018?**

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi alasan di balik keputusan Perdana Menteri Narendra Modi untuk kembali menjalankan atau menerapkan tindakan-tindakan proteksionis dalam aktivitas perekonomian India setelah India merasakan liberalisasi dalam perekonomiannya.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini disusun dengan tujuan agar para pembaca dapat memperoleh pengetahuan serta wawasan yang baru mengenai negara India, yang saat ini dipandang sebagai salah satu negara *rising power*, tentang alasan-alasan mengapa India kembali menerapkan tindakan proteksionis dalam aktivitas perekonomiannya setelah reformasi. Penelitian ini juga diharapkan dapat membantu peneliti lain kedepannya sebagai bahan referensi dan juga pembelajaran mengenai tindakan proteksionis di India.

1.4 Kajian Literatur

Untuk dapat memahami lebih lanjut mengenai keputusan India untuk kembali menerapkan kebijakan ekonomi proteksionisme sebagai salah satu bentuk kebijakan luar negerinya, maka beberapa jurnal di bawah ini dapat dijadikan sebagai acuan untuk memahami faktor-faktor yang berpotensi menjadi alasan India lebih dalam.

Merve Ahsen Demir membahas dampak dari kebijakan proteksionisme dalam jurnalnya yang berjudul *The Effects of Protectionist Policies on International Trade*. Dalam jurnal ini dinyatakan bahwa adanya kebijakan proteksionisme dapat menimbulkan efek negatif dalam perekonomian negara-negara di sekitarnya. Peningkatan tindakan proteksionis di satu negara dapat menyebabkan negara lain menganut proteksionisme juga. Oleh karena itu, situasi ekonomi di negara-negara tersebut dapat menjadi lebih buruk karena kekayaan global yang ikut mengalami penurunan. Jika suatu negara maju dan perdagangannya dibatasi, situasi ini akan

mempengaruhi keseimbangan permintaan-penawaran dunia. Ketika negara maju menerapkan langkah-langkah proteksionis pembatasan impor, permintaan di pasar dunia akan turun dan harga komoditas juga akan turun. Penurunan harga akan mengembalikan produsen komoditas tersebut sebagai kerusakan. Dalam kaitan itu, negara-negara yang kontribusinya terhadap pasokan dunia sangat besar harus menerapkan kebijakan proteksionis secara hati-hati dibandingkan dengan negara-negara perdagangan lainnya.²³

Selain itu, dalam literatur lain yang berjudul *Impact of Protectionism on the Long Run Economic Growth of a Country – A Brief Review* oleh Irugalbandara menyatakan bahwa para ekonom dan pembuat kebijakan telah mengidentifikasi banyak dampak proteksionisme perdagangan pada efek jangka pendek dan panjang terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara. Melalui analisis data kritis, jurnal ini menekankan bahwa proteksionisme memiliki dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan ekonomi sementara terdapat dampak positif yang signifikan dari perdagangan bebas, mengurangi hambatan perdagangan dan deregulasi pada pertumbuhan ekonomi. Proteksionisme mungkin efektif dalam pertumbuhan ekonomi jangka pendek, tetapi sebagian besar dalam jangka panjang, itu berbahaya. Ini membuat negara dan perdagangannya kurang kompetitif dalam bisnis internasional. Berdasarkan tinjauan data yang komprehensif, dapat dirasakan bahwa ancaman proteksionisme lebih dari manfaatnya yang menggarisbawahi

²³ Merve Ahsen Demir, "The Effects of Protectionist Policies on International Trade," *PEOPLE: International Journal of Social Sciences*, Vol. 3 (2), p, 136-168, 10.20319/pijss.2017.32.136158.

proteksionisme bukanlah solusi untuk masalah pertumbuhan ekonomi jangka panjang.²⁴

Literatur lain ditulis oleh Luca Ferrini dalam jurnal berjudul *What are the Main Causes and Effects of Economic Protectionism?* menyatakan dalam pandangan ekonomi, efek dari proteksionisme dapat terlihat jelas dan beragam. Proteksionisme membutuhkan sumber daya (misalnya pajak pendapatan) yang diambil dari industri lain. Hal ini juga membutuhkan sumber daya jauh dari individu dan rumah tangga, yang menghadapi harga yang lebih tinggi untuk barang-barang yang terkena efek proteksionisme. Sebagai akibatnya aktivitas konsumsi menurun drastik, karena berkurangnya daya beli masyarakat. *Output* di negara pesaing juga berkurang sebagai akibat dari penurunan penjualan di negara yang dilindungi. Selain itu, umumnya ketidakpastian dalam kebijakan perdagangan melemahkan pertumbuhan itu sendiri, karena perusahaan tidak yakin tentang berapa banyak yang harus diinvestasikan dan banyak penelitian telah menunjukkan tingginya biaya yang harus dikeluarkan negara untuk menjalankan sistem proteksionisme ini. Ferrini menyatakan bahwa peningkatan impor tidak menyebabkan pengangguran yang lebih tinggi dan bahwa pembatasan perdagangan tidak menciptakan pekerjaan yang lebih besar.²⁵

Kajian-kajian yang telah dijabarkan di atas menyatakan pandangan yang sama bahwa adanya kebijakan proteksionisme yang diadopsi oleh suatu negara

²⁴ Irugalbandara, "Impact of Protectionism on the Long Run Economic Growth of a Country - A Brief Review" *University of Sry Jayewardenepura*, December 2019, SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3497552>

²⁵ Lucca Ferrini, "What are the Main Causes and Effects of Economic Protectionism?," *E-International Relations*, August 2012, ISSN 2053-8626

dapat menimbulkan dampak-dampak negatif bukan hanya terhadap negara itu sendiri melainkan juga terhadap negara-negara sekitar. Namun, berbagai penelitian hanya merujuk atau melihat pada hasil akhir dari kebijakan proteksionis tanpa berfokus pada penyebab atau alasan dibalik tindakan proteksionisme tersebut. *Research gap* tersebut yang akan menjadi fokus dari penelitian ini terutama untuk menjawab alasan dibalik kebijakan proteksionisme India di bawah pemerintahan Narendra Modi menggunakan *foreign policy analysis theoretical integration*.

1.5 Kerangka Pemikiran

Untuk menjelaskan secara lebih komprehensif mengapa India mengambil tindakan-tindakan proteksionis dalam bidang ekonomi, maka digunakan salah satu perspektif utama dalam IPE (*international political economy*), yakni teori merkantilisme. Merkantilisme juga dikenal dengan *economic nationalism* atau nasionalisme ekonomi. Nasionalisme ekonomi dapat didefinisikan sebagai seperangkat kebijakan yang ditujukan untuk menekankan kegiatan ekonomi dalam negeri demi terwujudnya kepentingan nasional.²⁶ Konsep nasionalisme ekonomi ini dibangun di atas konsep nasionalisme yang lebih luas, dengan menekankan pada pentingnya identitas nasional. Nasionalisme ekonomi, dengan penekanannya pada keamanan ekonomi, berfokus pada penggunaan instrumen kebijakan ekonomi untuk meningkatkan kekuatan nasional dan persatuan di suatu negara.²⁷

²⁶ Serap Durusuoy, Edgardo Sica, dan Zeynep Beyhan, "Economic Crisis and Protectionism Policies: The Case of the EU Countries," *International Journal of Humanities and Social Science*, June 2015, Vol. 5, No. 6(1), 57-67.

²⁷ Peter Enderwick, "Understanding the rise of global protectionism," 2011, *Thunderbird International Business Review*, 53(3), 325–336. doi:10.1002/tie.20410.

Teori merkantilisme lebih difokuskan pada '*benign*' merkantilisme, yaitu keadaan di mana negara dipandang lebih memperhatikan kepentingan ekonomi nasionalnya karena hal tersebut merupakan salah satu faktor terpenting dalam mempertahankan keamanan negara atau *national security* serta cara negara untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Teori ini juga menekankan pada kesuksesan ekonomi yang selalu disertai dengan adanya peran negara dalam mempromosikan pembangunan ekonomi dalam negerinya.²⁸ Barry Buzan mengklaim bahwa merkantilisme *benign* mengarah pada terjadinya stabilitas internasional.²⁹

Dalam penelitian ini, penulis juga menggunakan salah satu pemikiran dari Michael Brecher mengenai *foreign policy analysis theoretical integration*. Secara garis besar, Brecher menyatakan bahwa adanya suatu kebijakan baru yang di buat oleh suatu negara tidak terlepas dari faktor-faktor yang memengaruhi sebelum proses perumusan kebijakan tersebut. Sama halnya dengan suatu informasi, faktor-faktor yang terdiri atas fenomena tertentu bergerak menjadi sumber atau dasar dalam perumusan kebijakan. Selain itu, Brecher juga mengidentifikasi permainan pandangan dari para pengambil keputusan suatu negara.

Adanya kebijakan luar negeri proteksionisme di India tidak terlepas dari adanya proses perumusan kebijakan tersebut yang dijelaskan menggunakan salah satu pemikiran Michael Brecher, yakni teori *foreign policy analysis theoretical integration*. Terbentuknya suatu kebijakan luar negeri, menurut Brecher tidak

²⁸ Robert H Jackson., dan Georg Sørensen, "Introduction to International Relations Theories and Approaches," *Oxford: Oxford University Press*, 2010.

²⁹ Barry Buzan, "Economic Structure and International Security: The Limits of the Liberal Case," *International Organization* 38, 1984.

terlepas dari adanya berbagai variabel yang turut memengaruhi dalam setiap proses pengambilan keputusan kebijakan luar negeri di suatu negara.

Brecher menyatakan pemikirannya dengan membagi serangkaian proses pengambilan keputusan ke dalam 3 (tiga) tahapan, yakni *input*, proses, dan *output*³⁰. Tahapan *input* merupakan lingkup operasional yang melingkupi lingkup operasional eksternal dan internal. Dalam hal ini, lingkup operasional eksternal melingkupi hal-hal yang terjadi di luar negara atau di lingkungan internasional atau global, *subordinate*, maupun hubungan bilateral suatu negara. Sedangkan lingkup operasional internal membahas hal-hal yang terjadi di dalam negara, seperti kapabilitas ekonomi dan juga politik suatu negara. Adanya fenomena atau faktor-faktor tersebut yang kemudian akan bertransformasi menjadi suatu informasi yang kemudian diserap oleh para pengambil keputusan di suatu negara. Informasi ini kemudian akan membangun persepsi-persepsi dari para *elit* pembuat kebijakan yang nantinya juga akan memengaruhi perumusan kebijakan. Pandangan atau persepsi dari para elit pembuat kebijakan inilah yang kemudian disebut sebagai lingkup psikologis, menurut Brecher. Lingkup psikologis terbagi menjadi *attitudinal prism* dan *elite images*. *Attitudinal prism* berbicara mengenai faktor-faktor yang membentuk sikap dan perilaku masyarakat di suatu negara, hal ini meliputi ideologi, sejarah, dan adanya kecenderungan kepribadian masyarakat suatu negara dalam memandang suatu fenomena. Sedangkan, *elite images* mengacu

³⁰ Michael Brecher, Blema Steinberg, and Janice Stein, "A framework for research on foreign policy behavior," *Journal of Conflict Resolution*, 1969, 13: 75, DOI: 10.1177/002200276901300105

pada pandangan dan respon para pengambil keputusan mengenai faktor-faktor yang ada di dalam lingkup operasional.

Kedua lingkup yang terjadi dalam tahapan input di atas yang kemudian menjadi landasan dalam tahap proses pengambilan keputusan yang akan mengeluarkan kebijakan sebagai *output*. Tahapan proses meliputi terjadinya formulasi kebijakan termasuk didalamnya perubahan arah kebijakan maupun pembuatan kebijakan baru yang akan menjadi jawaban atau respon dari permasalahan yang terjadi dalam lingkup operasional. Selanjutnya dalam tahapan ini juga akan terjadi implementasi kebijakan yang biasanya dicetuskan oleh kepala negara. Terakhir, tahapan *output* merupakan tahapan terakhir yang merupakan penerapan atau implementasi dari kebijakan yang telah dibentuk dan dicetuskan. Teori *foreign policy analysis theoretical integration* oleh Michael Brecher ini digunakan penulis untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi alasan di balik tindakan proteksionis India dalam bidang ekonomi.

1.6 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

1.6.1 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penggunaan metode penelitian kualitatif ini menurut John W. Creswell, bertujuan untuk melihat atau bahkan merekonstruksi lebih lanjut sebuah realita atau fenomena sosial dengan berbagai nilai-nilai budaya yang ada di dalam maupun di sekitarnya, dan dengan berfokus pada adanya proses yang interaktif (saling memengaruhi).³¹

³¹John W. Creswell, "Qualitative inquiry & Research design," *Amerika: Sage Publication*, 2007.

1.6.2 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data kualitatif, yaitu data yang bersifat non-numerik, sehingga dalam aktivitas pengumpulan datanya juga bergantung pada data-data yang sifatnya non-numerik. Bentuk data yang diambil dalam penelitian ini menggunakan studi-studi terdahulu dalam membahas kebijakan ekonomi proteksionisme India beserta faktor-faktor yang dapat menjadi alasan terkait penerapan kebijakan tersebut, baik melalui buku-buku, artikel, jurnal serta data-data yang disediakan di internet akan tetapi juga memperhatikan kredibilitas situsnya.

1.7 Sistematika Pembahasan

Penelitian ini terbagi ke dalam 5 bagian utama. Bagian pertama atau Bab I memuat latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian literatur, kerangka teori, metode penelitian, teknik pengumpulan data, dan sistematika pembahasan.

Selanjutnya, pada Bab 2 penelitian difokuskan pada tindakan-tindakan proteksionis yang membahas jalannya aktivitas ekonomi proteksionisme di India pada tahun 2014 hingga 2018 dan dampak dari adanya perubahan kebijakan ekonomi tersebut.

Kemudian, pada Bab 3 dalam penelitian ini mengidentifikasi jalannya proses pengambilan keputusan kebijakan di India secara umum, termasuk didalamnya aktor-aktor yang berperan, kontestasi politik domestik di India, dan

juga Perdana Menteri Narendra Modi sebagai aktor individu yang penting dalam pengambilan keputusan di India pada masa pemerintahannya.

Selanjutnya, Bab 4 merupakan bab analisis untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi alasan dibalik tindakan-tindakan proteksionis Modi dengan menggunakan teori *foreign policy analysis theoretical integration* milik Michael Brecher. Identifikasi ini meliputi tahapan *input* dan juga proses dalam menentukan faktor-faktor yang menjadi jawaban dari pertanyaan penelitian.

Terakhir, pada Bab 5 merupakan bab terakhir dalam penelitian ini yang memuat kesimpulan, berisikan hasil atau jawaban dari pertanyaan penelitian.

